

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 16 Tahun 2021 merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2020 tentang Sertipikat Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah.

BUKU :

A. Mukti Arto, Prinsip-Prinsip dan Praktik Peradilan, Yogyakarta: UII Press, 2015.

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Pertanahan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018, hlm. 102.

Andi Hamzah, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Andi Hamzah, Reformasi Birokrasi Pertanahan di Era Digital, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020, hlm. 133.

Arie Sukanti Hutagalung, Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pertanahan, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 99.

Arie Sukanti Hutagalung, Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pertanahan, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 104.

Bambang Waluyo, Penanganan Kasus Pertanahan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021.

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, 2005, 2007, dan 2020.

Boedi Oka, Keadilan Agraria dalam Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: Mitra Hukum, 2023.

- Budi Priyatno, Penguatan Kapasitas SDM Pertanahan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022.
- Budi Santosa, Etika dan Integritas Birokrasi Publik, Bandung: Refika Aditama, 2021.
- Budi Santoso, Etika Pemerintahan dan Akuntabilitas Publik, Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Denny Indrayana, Hukum Tata Pemerintahan, Jakarta: Prenadamedia, 2021.
- Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, Pedoman Teknis Pendaftaran Tanah, Jakarta: Kementerian ATR/BPN, 2019.
- Effendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 144.
- Gustav Radbruch, Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht (1932), dalam Philosophy of Law.
- H. Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, terj. Somardi, Jakarta: Bee Media Indonesia, 2019.
- Hery Santosa, Otonomi Daerah dan Tata Kelola Pertanahan, Yogyakarta: Genta, 2020.
- J. Satrio, Hak Kebendaan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- J. Satrio, Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- J. Satrio, Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019, hlm. 57.
- J. Satrio, Perlindungan Hukum atas Hak Milik Tanah, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- M. Ali Cholid, Sengketa Pertanahan: Penyelesaian dan Penanganannya, Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- M. Ali Hasan, Sertipikat Hak Atas Tanah sebagai Alat Bukti, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2016 dan 2021.

- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUH Perdata Buku II Tentang Benda, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta: Kanisius, 2022.
- Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta: Kompas, 2001 dan 2017.
- Maria S.W. Sumardjono, Menuju Kepastian Hukum Hak Atas Tanah, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Maria S.W. Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2022.
- Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002 dan 2021.
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Peradaban, 2007.
- R. Subekti, Hukum Agraria, Cet. Kedua, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.
- R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermedia, 2005 dan 2022.
- Rachmadi Usman, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Rachmadi Usman, Hukum Pertanahan, Jakarta: Kencana, 2021.
- Rachmadi Usman, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Ridwan Khairandy, Hukum Agraria dan Pendaftaran Tanah, Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Ruchiyat, E., Hukum Pertanahan di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Salim HS, Hukum Agraria Teori dan Praktik, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Salim HS, Hukum Pertanahan dalam Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Salim HS, Perkembangan Hukum Hak Atas Tanah, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Soehino, Dasar-Dasar Ilmu Negara, Yogyakarta: Liberty, 2020.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sri Soemantri, Manajemen Risiko Hukum dalam Administrasi Pemerintahan, Malang: UMM Press, 2020.
- Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermedia, 2022.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, edisi 1993, 2018, dan 2019.
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2014, hlm. 123.
- Sugianto, Hukum Administrasi Negara dan Reformasi Birokrasi, Malang: Setara Press, 2020.
- Supriadi, Hukum Agraria, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 211.
- T. Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- T. Sutedi, Sengketa Pertanahan dan Penyelesaiannya, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Yahya Harahap, Hukum Pertanahan Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Yahya Harahap, Hukum Pertanahan, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Yando Zakaria, Agraria dan Keadilan Sosial, Jakarta: ELSAM, 2020.
- Yudha Pratama, Problematika Sertipikat Tanah di Indonesia, Jakarta: Prenadamedia, 2022.

Yudha Pratama, *Sinergi Lintas Sektor dalam Reformasi Agraria*, Bandung: Alfabeta, 2021.

JURNAL :

Cangtika Laurensia & Gunawan Djajaputra. (2023). "Tanggung Jawab BPN terhadap Tumpang Tindih Sertipikat Hak Atas Tanah." *Syntax Literate*, Vol. 8, No. 2.

Dwi Rahayu, "Evaluasi Integrasi Data Pertanahan di Indonesia," *Jurnal Reformasi Agraria*, Vol. 7 No. 3, 2023.

Fatimah Zahra, "Perlindungan LPSK terhadap Korban Sengketa Pertanahan," *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 5 No. 2, 2022.

Firman Rachman, "Dampak Sengketa Tanah Terhadap Nilai Ekonomi Aset," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Pertanahan*, Vol. 5 No. 1, 2021.

Gunawan Widjaja, "Mediating Land Disputes in Indonesia," *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 7 No. 1, 2021.

Junaedi, "Implementasi Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Sengketa Agraria," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 10 No. 2, 2022.

Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol. 3 No. 2 (2019), "Pemetaan Bidang Tanah dan Pencegahan Tumpang Tindih Sertifikat."

Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol. 6 No. 1, 2020, "Kajian Yuridis Terhadap Sertifikat Ganda Dalam Sistem Pendaftaran Tanah."

Jurnal Hukum dan Pembangunan, "Efektivitas PTSL dalam Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah", Vol. 50, No. 2, 2022.

Jurnal Hukum IUS, Vol. 5 No. 2 (2017), "Evaluasi Sertipikat Ganda dalam Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia".

Jurnal Hukum IUS, Vol. 7 No. 1 (2019), "Urgensi Integrasi Data Pertanahan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia".

Jurnal Rechts Vinding, "Sengketa Tanah dan Peran Mediasi dalam Penyelesaiannya", Vol. 9, No. 1, 2021.

Muhammad Arifin, "Rechtsverwerking dalam Sengketa Pertanahan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 1, 2021.

Muhammad Erwin, "Pendaftaran Tanah Secara Elektronik dan Tantangan Implementasinya," *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 6 No. 1, 2022.

Nurhasan Ismail, "Tanggung Jawab Hukum Badan Pertanahan Nasional dalam Kasus Tumpang Tindih Sertipikat Hak Atas Tanah", *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 5, No. 3 (2017): 547–562.

Nurhasan Ismail, "Tanggung Jawab Hukum Badan Pertanahan Nasional dalam Kasus Tumpang Tindih Sertifikat Tanah," *Jurnal Hukum*, 2016, hlm. 87.

Prasetyo, "Peran Notaris dan PPAT dalam Pencegahan Sengketa Tanah," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 11 No. 1 (2023).

Rahayu Wulandari, "Peran Ombudsman dalam Pengawasan Layanan Publik Agraria," *Jurnal Transformasi Hukum*, Vol. 6 No. 2, 2022.

Ria Fitria, "Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah," *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 10 No. 3 (2020): 88.

Yusriadi, "Tanggung Gugat Negara dalam Kasus Sertipikat Ganda," *Jurnal Hukum Kenotariatan Indonesia*, Vol. 3 No. 2, 2020.

TESIS :

Andani, M. P. (2017). Akibat Hukum Terbitnya Sertipikat Ganda yang Dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Tesis, Universitas Brawijaya.

Baqi Zabidi Rois. (2022). Peran dan Tanggungjawab BPN dalam Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih di Cilacap. Universitas Islam Sultan Agung.

Kasyim, S.A. (2021). Penyelesaian Administratif oleh BPN dalam Sengketa Sertipikat. UIN Jakarta Repository.

Renaldi. (2020). Pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional Terhadap Munculnya Sertipikat Dengan Kepemilikan Ganda. Universitas Jember.

Vika Mega Hardhani. (2019). Tanggung Jawab Kepala Kantor Pertanahan atas Penerbitan Sertipikat Ganda (Studi Putusan Nomor 67/G/2017/PTUN.SMG). Universitas Brawijaya.

LAPORAN :

Ombudsman Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2022: Maladministrasi di Bidang Pertanahan*, Jakarta: ORI, 2022, hlm. 45.